



KEKUATAN HUKUM YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KEPUTUSAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PRELIMINARY DECISION IN UKRAINE v RUSSIA 2022

Diajeng Dhea Annisa Aura Islami¹, M. Rizki Yudha Prawira²

^{1 2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

¹ E-mail: 2210611174@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Email: rizkiyudha@upnvj.ac.id

Abstract

Historically, Ukraine's conflict with Russia dates back to 1991 when the Soviet Union collapsed and its member states seceded. In 2021, Ukraine joined NATO. Russia then felt its national security had been threatened. Russian military operations were then interpreted by Ukraine and several countries in the world as a genocide convention. The International Court of Justice then issued the International Court of Justice Preliminary in Ukraine v Russia (2022). The purpose of the research is to comprehensively and deeply examine the legal force of the jurisdiction of the International Court of Justice based on the International of Justice Preliminary decision in Ukraine v Russia (2022). The research method used is a literature study based on reliable sources as a reference for research, such as accredited scientific research journals, research articles with relevant topics, and international law regulations. The result of the research is that the International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia (2022) has legal force that must be obeyed by the parties involved in the dispute.

Keywords: *Legal Power, International Court of Justice, Ukraine's Conflict with Russia.*

Abstrak

Abstrak: Pada sejarahnya, konflik Ukraina dengan Rusia telah terjadi pada tahun 1991 saat di mana Uni Soviet runtuh dan negara-negara yang tergabung di dalamnya melakukan pemisahan diri. Pada 2021, Ukraina bergabung dengan NATO. Rusia kemudian merasa ketahanan nasionalnya telah terancam. Operasi Militer Rusia kemudian ditafsirkan oleh Ukraina dan beberapa negara di dunia sebagai konvensi genosida. Mahkamah Internasional kemudian mengeluarkan *International Court of Justice Preliminary in Ukraine v Russia (2022)*. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terkait kekuatan hukum yurisdiksi Mahkamah Internasional berdasarkan keputusan *International of Justice Preliminary in Ukraine v Russia (2022)*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan berdasarkan pada sumber-sumber terpercaya sebagai acuan dari penelitian, seperti jurnal penelitian ilmiah yang telah terakreditasi, artikel penelitian dengan bahasan relevan dan peraturan hukum internasional. Hasil penelitian adalah *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia (2022)* memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Kata Kunci: *Kekuatan Hukum, Mahkamah Internasional, Konflik Ukraina dengan Rusia.*

1. Pendahuluan

Konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Jika mereka ulang kembali sejarah yang melatarbelakanginya, konflik ini telah terjadi sejak tahun 1991 saat dimana Uni Soviet runtuh dan beberapa negara di wilayah negara tersebut memisahkan diri.¹ Salah satu negara yang berhasil memisahkan diri dan mendeklarasikan kedaulatannya dari Moskow sebagai ibu kota negara Rusia adalah Ukraina.² Selanjutnya hal lain yang melatarbelakangi konflik Rusia - Ukraina juga dipicu dengan terjadinya peristiwa Revolusi Oranye. Peristiwa ini terjadi bermula saat terpilihnya Victor Yanukovych sebagai presiden dan muncul kecurigaan adanya kecurangan dibalik itu semua. Tuduhan kecurangan tersebut memicu protes publik yang berujung dengan pemungutan suara ulang kembali digelar.³

Akibat dari terjadinya revolusi oranye membuat Kiev sebagai Ibu Kota negara Ukraina, menjadi pusat pergerakan dengan ribuan pengunjung rasa yang berdemonstrasi setiap hari. Aksi protes yang merambat ke seluruh negara berhasil memicu pembatalan hasil pemilihan dan penyelenggaraan ulang pemilihan oleh pemerintah pada 26 Desember 2004. Di bawah pengawasan pengamat internasional dan domestik, pemilihan ulang ini dianggap sebagai proses yang bersih dan sehat. Hasil akhirnya menunjukkan kemenangan bagi Victor Yushchenko yang sebelumnya kalah dalam pemilihan pertama dari saingannya, Victor Yanukovych. Yushchenko kemudian diumumkan sebagai pemenang pemilihan dan dilantik sebagai presiden pada 23 Januari 2005 di Kiev.⁴

Setelah dinyatakan terpilih kembali dalam Pemilihan Presiden, Victor Yanukovych membangun kembali kerja sama antara Ukraina dengan Moskow yang berakibat pada beberapa aspek kehidupan berbangsa, yaitu terganggunya ketertiban dan perlindungan atas kecaman yang terjadi. Keputusan tersebut memicu aksi demonstrasi yang berlangsung secara besar-besaran dan dalam kurun waktu cukup lama. Aksi protes yang terjadi berubah menjadi kekerasan, puluhan pengunjung rasa dilaporkan tewas. Pada bulan Februari 2014, Parlemen Ukraina kemudian memilih untuk menghapuskan Yanukovych dari posisi kepemimpinan. Tindakan ini dilakukan setelah terjadinya tumpahan darah dalam kerangka sistem demokrasi sebagai hasil penolakan terhadap keputusannya. Beberapa hari kemudian, pasukan militer mengambil alih kendali parlemen di Krimea dan mengibarkan bendera Rusia. Kemudian, pada bulan April 2014, kelompok separatisme yang mendukung Rusia di

¹ Syahbuddin & Tati Haryati, Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia, Jurnal Pendidikan IPS, STKIP Taman Siswa Bima, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 39.

² Wildan Arif Nurkhasan, Setyasih Harini, & Sritami Santi Hatmini, *Luhanks and Donets Separatists in Ukraine in 2022*, Jurnal Solidaritas Fisip Unisri, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 2.

³ Rahma Indina Harbani, Kronologi Konflik Rusia-Ukraina Sejak 1991, Berawal dari Pecahnya Soviet, dari: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5966988/kronologi-konflik-rusia-ukraina-sejak-1991-berawal-dari-pecahnya-soviet>, diakses pada 4/10/2023.

⁴ Naomy A. Nugraheni, Cerita Penegakan Demokrasi di Ukraina Via Revolusi Oranye Hari ini 17 Tahun Lalu, 2021, dari: [Cerita Penegakan Demokrasi di Ukraina Via Revolusi Oranye Hari Ini 17 Tahun Lalu - Dunia Tempo.co](https://www.dunia-tempo.co), diakses pada 4/10/2023.

wilayah timur Donbas mendeklarasikan kemerdekaannya.⁵ Pada tahun 2017, terjadi serangan siber terhadap komputer pemerintah dan perusahaan di Ukraina yang dicurigai dilakukan oleh entitas Rusia.⁶

Pada tahun ini pula perjanjian kerja sama antara Ukraina dengan Uni Eropa mengenai pasar perdagangan bebas, baik itu barang dan jasa maupun perjalanan bebas visa dari Uni Eropa untuk Ukraina telah tercipta. Tahun 2019, Volodymyr Zelensky kemudian terpilih untuk selanjutnya memimpin Ukraina. Meskipun telah berpindah kepemimpinan, nyatanya konflik antara Rusia dan Ukraina tidak kunjung meredam. Pada Januari 2021, Zelensky meminta izin dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, agar Ukraina dapat menjadi anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Sementara itu, pada musim semi tahun 2021, Rusia mulai memobilisasi pasukan bersenjata di dekat perbatasan Ukraina. Rusia mengklaim bahwa kegiatan tersebut merupakan latihan militer.⁷

Pada bulan November 2021, gambar satelit yang diambil oleh Maxar Technologies menggambarkan konsentrasi pasukan Rusia di sekitar perbatasan Ukraina. Kemudian, pada tanggal 17 Desember 2021, Rusia mengemukakan sejumlah tuntutan keamanan, termasuk meminta NATO untuk mengurangi kehadiran pasukan dan senjata mereka di wilayah Eropa Timur. Mereka juga akhirnya melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO sebab persetujuan untuk melakukan latihan udara skala besar oleh Ukraina dengan NATO membuat khawatir Rusia dan berprasangka bahwa segala bentuk latihan juga kerja sama yang dilakukan oleh Ukraina dengan Rusia merupakan sebuah penyerangan yang akan menghancurkan Rusia. Selanjutnya pada 24 Januari 2022, NATO mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kewaspadaan pasukan bersenjata dan memperkuat posisi mereka di wilayah timur Eropa dengan menambah jumlah kapal dan pesawat tempur. Dua hari setelah itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran keamanan yang diajukan oleh Rusia, dengan mengonfirmasi komitmen NATO untuk membuka peluang bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan aliansi tersebut. Pemerintah Amerika Serikat juga menawarkan upaya evaluasi yang lebih pragmatis terhadap kekhawatiran yang telah disampaikan oleh Moskow. Namun, pada tanggal 28 Januari, Rusia menyatakan bahwa permintaannya tidak dipenuhi. Akhirnya, pada awal Februari 2022, kekhawatiran negara-negara Barat tentang potensi serangan Rusia terhadap Ukraina semakin meningkat.⁸

Tanggal 21 Februari, Putin melalui pidatonya menyatakan bahwa Ukraina merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah Rusia. Ia juga mengklaim bahwa Ukraina dijalankan oleh rezim boneka dengan pengaruh asing di belakangnya. Putin

⁵ Teti Purwati, Simak! Sejarah Panjang Gejolak Politik Ukraina, Sejak 1991, 2022, dari: <https://www.cncindonesia.com/market/20220201113658-17-312028/simak-sejarah-panjang-gejolak-politik-ukraina-sejak-1991>, diakses pada 04/10/2023.

⁶ Danur Lambang Pristiandaru, Serangan Siber Besar - Besaran di Ukraina, Banyak Situs Web Pemerintah Diretas, 2022, dari: <https://www.kompas.com/global/read/2022/01/14/183100970/serangan-siber-besar-besaran-di-ukraina-banyak-situs-web-pemerintah>, diakses pada 04/10/2023.

⁷ Rahma Indina Harbani, *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

memerintahkan pasukan penjaga perdamaian menuju dua wilayah yang menyatakan kemerdekaan mereka di timur Ukraina, yaitu Luhansk dan Donetsk.⁹ Situasi tersebut membuat Presiden Zelensky dari Ukraina meminta penduduknya untuk tetap tenang. Pemimpin separatis yang mendapat dukungan dari Rusia memohon bantuan kepada Rusia dalam menghadapi serangan dari pasukan militer Ukraina pada tanggal 23 Februari 2022. Kendati Putin belum memerintahkan pasukan memasuki wilayah Ukraina, muncul kecurigaan dari Amerika Serikat bahwa permintaan bantuan tersebut sebagai dalih pembenar untuk masuk wilayah teritorial Ukraina lalu memulai invasi.¹⁰ Satu hari setelahnya, Putin memberikan persetujuan untuk melancarkan operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Rusia kemudian memulai serangan dengan menggunakan rudal dan artileri, termasuk melakukan serangan terhadap kota-kota besar di Ukraina seperti Kiev.¹¹

Pada tanggal 26 Februari 2022, negara-negara Sekutu Barat merespons dengan menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia, termasuk pembatasan terhadap bank sentral Rusia serta mengeluarkan Rusia dari sistem transaksi keuangan global, yaitu *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT). Sanksi terhadap Rusia terus dilakukan hingga 27 Februari 2022. Namun, sanksi tersebut tidak membuat Rusia takut, bahkan Pasukan Rusia mulai maju menuju tiga kota besar Ukraina, yaitu Kyiv, Kharkiv, dan Kherson. Pada tanggal 28 Februari, Ukraina mengajukan permintaan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Rusia dan Ukraina sepakat untuk mengadakan perundingan awal di perbatasan Belarusia. Namun, perundingan tersebut berakhir tanpa kesepakatan.¹²

Ukraina telah mengambil tindakan untuk menghadapi Rusia di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* - ICJ) dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan pada 26 Februari 2022.¹³ Permohonan Ukraina kepada Mahkamah Internasional didasarkan pada Konvensi Genosida. Genosida merupakan segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan pembantaian secara besar-besaran untuk memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Melalui prosedur jalur cepat, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan awal pada 16 Maret 2022 yang berisikan pula langkah-langkah sementara untuk menanggukkan agresi militer yang menurut sudut pandang dari Ukraina, Rusia telah keliru untuk menyatakan bahwa memang benar adanya serangan yang dilakukan oleh Rusia merupakan Genosida dengan beberapa bukti dan pendapat dari beberapa negara

⁹ Sefti Oktarianisa, *Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina*, 2022, dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina/amp>, diakses pada 04/10/2023.

¹⁰ Mahdi Muhammad, *Kelompok Separatis Minta Bantuan Rusia, Putin Serukan Operasi Khusus*, 2022, dari: https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/02/24/kelompok-separatis-meminta-bantuan-rusia-putin-serukan-operasi-khusus?status=sukses_login&status_login=login, diakses pada 04/10/2023.

¹¹ Umayya Khusniah, *Rusia Serang Ukraina, Ini Sebenarnya Tujuan Presiden Vladimir Putin*, 2022, diakses pada: <https://www.inews.id/news/internasional/rusia-serang-ukraina-ini-sebenarnya-tujuan-presiden-vladimir-putin/all>, diakses pada 04/10/2023.

¹² Rahma Indina Harbani, *Ibid.*

¹³ Wildan Arif Nurkhasan, Setyasih Harini, dan Sritami Santi Hatmini, *Luhanks and Donets Separatists in Ukraine in 2022*, *Jurnal Solidaritas Fisip Unisri*, Vol. 6, No. 2, 2022.

di dunia. Setidaknya terdapat tiga hal yang diperintahkan melalui keputusan tersebut yaitu menghentikan operasi militer Rusia kepada Ukraina, tidak menindaklanjuti berbagai unit militer dan bersenjata baik langsung maupun sebagai pendukung pada operasi militer dan kedua belah pihak diminta untuk menahan diri dari hal yang bisa memperparah situasi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan Mahkamah Internasional dalam proses pengambilan sebuah keputusan awal atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina dengan dalih Agresi Militernya agar dapat dibenarkan dalam dunia internasional dan melakukan analisis secara mendalam mengenai kekuatan hukum dari dikeluarkannya *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia* (2022).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan berdasarkan pada berbagai peraturan perundang - undangan serta instrumen hukum internasional yang berlaku terkait kewenangan *International Court of Justice* dalam memberikan keputusan awal atas dugaan genosida oleh Rusia kepada Ukraina berdasarkan dengan *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia* (2022). Teknik dalam mengumpulkan data dalam artikel ilmiah ini adalah studi literatur yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian dengan berdasarkan pada sumber-sumber terpercaya sebagai acuan dari penelitian, seperti jurnal penelitian ilmiah yang telah terakreditasi, artikel penelitian dengan bahasan relevan yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, hasil penelitian terkait sumber-sumber hukum internasional, serta data berdasarkan laporan berita internasional yang relevan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kewenangan *International Court of Justice* Mengeluarkan Keputusan *Preliminary Decision In Ukraine v Russia 2022*

Agresi militer dapat berupa sebuah tindakan penyerangan suatu negara kepada negara lainnya dengan maksud merusak dan mengancam objek-objek negara tersebut. Pengertian agresi ini diatur melalui Pasal 8 *bis* Amandemen *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) 1998 adalah suatu tindakan perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan

¹⁴ European Parliament, 2023, *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine v Russia*, dari: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729350/EPRS_ATA\(2022\)729350_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729350/EPRS_ATA(2022)729350_EN.pdf). Diakses pada 04/10/2023.

mengarahkan langkah-langkah politik atau militer terhadap suatu negara lain.¹⁵ Agresi merujuk pada pemanfaatan kekuatan militer oleh suatu negara yang ditujukan untuk melanggar kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain. Agresi juga bisa mencakup tindakan lain yang melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB.¹⁶

Salah satu prinsip pelanggaran PBB yang dilanggar pada saat diberlakukannya agresi militer adalah tepat pada Pasal 51 Piagam PBB yang mana berisikan bahwa tidak ada ketentuan dalam Piagam ini yang dapat mengurangi hak individu atau kolektif untuk melakukan pertahanan diri ketika ada serangan bersenjata terhadap anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). Hak ini tetap berlaku sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan yang diambil oleh anggota dalam melaksanakan hak pertahanan diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Ini tidak akan mengurangi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional pada setiap saat. Pada intinya adalah sebuah negara dapat melakukan pertahanan diri sebagai respons terhadap serangan bersenjata yang ditujukan kepadanya dengan syarat tindakan tersebut proporsional dan harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB.¹⁷

Kondisi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai agresi sesuai dengan perubahan Statuta Roma adalah terjadi invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari satu negara ke wilayah negara lain.¹⁸ Hukum internasional melarang tindakan penyerangan terhadap negara lain karena melanggar prinsip kedaulatan negara dan non intervensi. Namun, ada beberapa pengecualian di mana intervensi dapat diterima, seperti intervensi kolektif berdasarkan Piagam PBB, perlindungan warga negara di luar negeri, pembelaan diri, protektorat atau dalam kasus pelanggaran serius terhadap hukum internasional.¹⁹ Pendapat dari Starke, seorang penulis buku tentang Pengantar Hukum Internasional ini sering digunakan sebagai dasar atau alasan untuk tindakan suatu negara, seperti pertahanan diri atau perlindungan warga negara di luar negeri, yang sering disebut sebagai pembelaan diri. Piagam PBB melarang serangan bersenjata, tetapi memperbolehkan pertahanan diri ketika negara anggota PBB menghadapi serangan bersenjata. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi dalih atas penyerangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina dalam kurun waktu terakhir ini.

¹⁵ Natalia Yeti Puspita, *Invasi Rusia Ke Ukraina Jilid II: Agresi Atau Self-Defence?*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 605.

¹⁶ Tita Nadira, Nuswantoro Dwiwarno, & Joko Setiyono, *Analisis Yuridis Serangan Amerika Serikat dengan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata terhadap Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran di Baghdad Irak Menurut Hukum Internasional*, Diponegoro Law Journal, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 538.

¹⁷ Andi Wiratama Satria, *Prinsip Kedaulatan Wilayah Negara Terhadap Masuknya Pesawat Tempur Asing Menurut Hukum Internasional*, Lex Administratum, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm 146.

¹⁸ Natalia Yeti Puspita, *Ibid.*

¹⁹ Muh. Risnain, *et all*, *Pengantar Hukum Internasional Pendekatan Kemahiran Hukum, Etika Hukum, Hukum dan Gender, serta Hukum dalam Konteks Lokal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2023) hlm. 4.

Operasi Militer Khusus yang diprakarsai oleh Putin di Ukraina pada tahun 2022 melibatkan beberapa strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan Rusia seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pasukan Rusia melancarkan serangan militer yang terkoordinasi ke berbagai daerah di Ukraina, termasuk wilayah perbatasan. Sayangnya, dalih Operasi Militer kemudian menimbulkan suatu perspektif baru yang mengarah kepada dugaan Kejahatan Genosida. Tujuan Rusia untuk melindungi keamanan nasional dan mempertahankan wilayah sebagaimana diklaim dirinya, pun pada kenyataannya dapat dicurigai sebagai bentuk kejahatan jika terjadi pemusnahan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja dimana juga biasa dikenal dengan sebutan Kejahatan Genosida.

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Statuta Roma mendefinisikan genosida sebagai upaya menghancurkan seluruh atau sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras atau agama dengan melakukan: pembunuhan para anggota kelompok, menyebabkan luka tubuh maupun mental yang sangat serius terhadap para anggota kelompok, dengan sengaja melakukan atau menciptakan Tindakan yang dapat berakibat pada kerusakan fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Tindakan - Tindakan berat yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran sebuah kelompok, dan pemindahan paksa anak - anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) melalui ketentuan Pasal 1 menjelaskan bahwa seluruh individu yang lahir bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Mereka diberi akal dan nurani, serta diharapkan untuk berinteraksi satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Dengan demikian, HAM haruslah dijunjung tinggi sebagaimana mestinya dan apabila terdapat pelanggaran, maka akan segera diproses melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang ada.

Operasi militer Rusia yang beralih demi mempertahankan pertahanan dan keamanan nasionalnya jika dilihat dari sudut pandang lain, perlu melihat sudut pandang lain dari sisi Ukraina yang mana menjadi dasar pengajuan kasus ke Mahkamah Internasional. Ukraina melayangkan pernyataan bahwa Rusia telah secara paksa memindahkan ribuan anak Ukraina ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kendalinya. Anak-anak tersebut diberikan kewarganegaraan Rusia, diadopsi secara paksa oleh keluarga Rusia, dan dicegah untuk bersatu kembali dengan orang tua dan tanah air mereka. Bukti ratusan ribu anak lain yang menjadi korban pula dalam konflik ini telah dipegang oleh pihak Ukraina.²⁰ Situasi tersebut membuat banyak pihak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pengusiran yang dimaksud. *International Criminal Court* (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin karena dukungannya yang tegas terhadap tindakan pengusiran paksa, termasuk melalui pengesahan undang-undang yang memfasilitasinya, serta terhadap

²⁰ Khairisa Ferida, Zelensky Sebut Rusia Lakukan Genosida di Ukraina, Desak Pemimpin Dunia Hadiri KTT Perdamaian, 2023, dari: [Zelensky Sebut Rusia Lakukan Genosida di Ukraina, Desak Pemimpin Dunia Hadiri KTT Perdamaian - Global Liputan6.com](https://www.globalliputan6.com), diakses pada 7/10/2023.

Komisaris Hak Anak Maria Lvova-Belova atas dugaan keterlibatannya. Tindakan tersebut semata – mata dianggap sebagai bentuk perlindungan kepada anak – anak di wilayah teritori Ukraina yang sedang diduduki oleh Rusia.²¹

Menurut hukum internasional, khususnya Konvensi Genosida 1948, tindakan deportasi anak sebagaimana dituduhkan tersebut hanya dapat dianggap sebagai genosida hanya jika dilakukan dengan niat untuk merusak atau menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu komunitas etnis atau kelompok etnis. Kendati demikian, berdasarkan pernyataan dari Komisi Anak Rusia sendiri menolak pernyataan yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan deportasi dengan tetap mempertanyakan data anak-anak tersebut.²² Perlu dipahami bahwa terdapat pertanyaan balik yang diajukan oleh Komisi Anak Rusia tersebut, maka secara tidak langsung, Rusia menyatakan bahwa mereka sudah dituduh tidak berlandaskan pada bukti yang jelas.

Sebelum ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin, Mahkamah Internasional telah mengeluarkan *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia (2022)* yang mana sudah menjadi wewenang yurisdiksinya sebagai bentuk penyampaian langkah-langkah sementara yang perlu dilakukan. Keputusan *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia* tertanggal 16 Maret 2022 berisi mengenai perintah sementara yaitu:

1. Rusia harus segera menghentikan operasi militer yang dimulai di Ukraina pada tanggal 24 Februari;
2. Rusia wajib memastikan bahwa tiap unit militer atau kelompok bersenjata yang diarahkan atau didukungnya, bersama dengan setiap organisasi dan individu yang berada di bawah kendalinya, tidak melakukan tindakan yang mendukung kemajuan operasi militer;
3. Baik pihak yang bersengketa harus menghindari melakukan tindakan apapun yang dapat memperburuk atau memperpanjang perselisihan yang sedang dipertimbangkan oleh Pengadilan atau membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan.

Perlu kita ketahui bahwa keputusan ini dikeluarkan sebab Ukraina yang mengajukan kepada Mahkamah Internasional dengan dugaan bahwa Rusia keliru melakukan genosida di Luhansk dan Donetsk. Pada permohonannya, Ukraina tidak menyebutkan secara langsung bahwa Rusia telah melakukan tindak Kejahatan Genosida, tetapi dengan isyarat bahwa Rusia mungkin saja merencanakan tindakan genosida di Ukraina. Nampaknya beberapa argumen yang dilayangkan oleh Ukraina sebagai dasar dari permohonan, tidak dapat mendorong Mahkamah Internasional untuk menyatakan secara resmi bahwa Rusia telah melakukan tindak genosida ke Ukraina dengan dalih awal Operasi Militer. Terlihat jelas dari sini bahwa terjadi perdebatan mengenai tafsir antara kedua belah pihak mengenai Kejahatan Genosida itu

²¹ Shenny Mutiara Irni & Dimas Prasetya, Kekuatan Hukum *International Criminal Court* Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, hlm. 2748.

²² Amri Amrullah, Komisi Anak – Anak Rusia Tolak Tuduhan Soal Penculikan Anak – Anak Ukraina, 2023, dari: [Komisi Anak Rusia Tolak Tuduhan ICC Soal Penculikan Anak-Anak Ukraina | Republika Online](#), diakses pada 7/10/2023.

sendiri. Maka demikian, sudah jalan yang tepat apabila Ukraina mengajukan kepada *International Court of Justice* atas konflik yang terjadi dengan Rusia pada belakangan tahun ini.

Mahkamah Internasional adalah salah satu lembaga hukum utama dimana mahkamah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PBB dan perlu dicatat bahwa Statuta Mahkamah Internasional adalah bagian integral dari Piagam PBB.²³ Tujuan pendirian Mahkamah Internasional adalah untuk menggantikan peran yang sebelumnya diemban oleh *Permanent International Court of Justice* dalam hal peradilan internasional.²⁴ Pada Konferensi San Fransisco tahun 1945, diputuskan untuk mendirikan sebuah Mahkamah Internasional baru yang nantinya akan menjadi salah satu lembaga kunci dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁵

Mahkamah Internasional memiliki susunan hakim yang terdiri dari 15 hakim yang berasal dari berbagai negara. Hakim-hakim ini dipilih secara mandiri oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa, serta masa jabatan mereka berlangsung selama sembilan tahun dan dapat diperpanjang.²⁶ Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Yurisdiksi ini mencakup kemampuan Mahkamah untuk memutuskan perkara-perkara sengketa, memberikan opini atau nasihat hukum internasional, serta mengadili sengketa antara negara-negara anggota PBB yang dirujuk kepadanya.²⁷ Adapun tujuan dari Mahkamah Internasional adalah untuk melayani komunitas internasional.

Salah satu ciri khas dari Mahkamah Internasional adalah kewajibannya untuk menerapkan hukum internasional dalam penyelesaian kasus yang diajukan kepadanya, kecuali jika perjanjian pendirian Mahkamah memberikan wewenang untuk menerapkan norma-norma lain, seperti aturan tentang keadilan dan kesetaraan.²⁸ Melihat situasi Rusia dan Ukraina, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah perkara sebagai bentuk opini maupun mengadili sengketa antar negara anggota PBB. Statuta Mahkamah Internasional berisi panduan tentang bagaimana menerapkan hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) *Statute of International Court of Justice* (Statuta Mahkamah Internasional) menjelaskan bahwa putusan yang diberikan mengacu sumber hukum internasional yaitu: perjanjian

²³ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 28.

²⁴ Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Febryani Sabatira, Muhammad Febriyan Saputra, Yulius Parlindungan Situmorang, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi 2*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022), hlm. 77.

²⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 72.

²⁶ Muh Nur Isra, Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism Dan Scandinavian Realism, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 5, No. 4, 2021, hlm. 1490.

²⁷ Indien Winarwati, *Eksistensi Mahkamah Internasional sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa - Bangsa*, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 9, No. 1, 2014, hlm. 63.

²⁸ Christian Gamas, *Seri Hukum Internasional #14 : Yuridiksi International Court of Justice (ICJ) / Mahkamah Internasional (Terakhir)*, dari: <https://christiangamas.net/seri-hukum-internasional-14-yuridiksi-international-court-of-justice-icj-mahkamah-internasional/>, diakses pada 26/10/2023.

internasional, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum internasional, keputusan pengadilan dan pendapat ahli hukum.²⁹

3.2 Kekuatan Hukum Terkait Dugaan Genosida yang Dilakukan Rusia melalui Preliminary Decision in Ukraine v Russia (2022)

Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara. *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia (2022)* memiliki kekuatan hukum yang mana keputusan Mahkamah Internasional harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Meskipun pada sebelumnya, Rusia tidak menghadiri panggilan persidangan atas dugaan kejahatan genosida berdasarkan pada alasannya yang dikemukakan bahwa mahkamah internasional tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut. Akan tetapi, hendaknya Rusia segera mematuhi segala putusan yang dikeluarkan pada *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia (2022)*.

Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan sementara yang diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Dalam Ayat (2), disebutkan bahwa sambil menunggu keputusan akhir, pihak-pihak yang terlibat dan Dewan Keamanan segera diberitahu tentang tindakan-tindakan yang diusulkan. Namun, masalah mengenai yurisdiksi Mahkamah Internasional atau kewenangan suatu pengadilan dalam Hukum Internasional adalah masalah yang mendasar yang dimana berdirinya Pengadilan ini juga didasarkan oleh kesepakatan atau Perjanjian Internasional itu sendiri. Yurisdiksi Mahkamah Internasional meliputi dua hal, yaitu yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan (*contentious jurisdiction*) dan yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum (*non-contentious jurisdiction*).³⁰

Berdasarkan pada kasus Ukraina dengan Rusia, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini masuk ke dalam cakupan yurisdiksi Mahkamah Internasional yang mana memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara negara-negara. Agar dapat diadili oleh Mahkamah, perselisihan tersebut harus bersifat hukum dan dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Mahkamah juga harus memastikan bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan tersebut. Hanya negara-negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan perselisihan mereka kepada Mahkamah, sehingga individu atau perusahaan yang merasa dirugikan oleh tindakan suatu negara harus melalui negara mereka untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Mahkamah.³¹ Hal tersebut sebagaimana telah diatur melalui Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menegaskan bahwa pihak yang memungkinkan menjadi pihak pada sengketa adalah negara.

²⁹ Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 16.

³⁰ Huala Adolf, *Ibid*, hlm. 81

³¹ Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional Sumber – Sumber Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 81

Meskipun sebuah negara menjadi pihak dalam Statuta Mahkamah dan berpotensi mengikuti proses peradilan di Mahkamah, tidak ada negara yang dapat diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihannya di Mahkamah tanpa persetujuannya. Istilah sepakat memiliki makna yang sangat penting. PBB tidak menggunakan istilah sepakat, tetapi lebih mengacu pada pengakuan suatu negara terhadap yurisdiksi Mahkamah atas suatu sengketa. Pengakuan ini dapat diberikan oleh negara melalui penandatanganan perjanjian (*acta compromis*), tindakan sepihak, atau metode lainnya.³² Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional. Mahkamah Internasional Permanen telah menggarisbawahi pentingnya kata sepakat dalam nasihat hukumnya dalam kasus *Status Eastern Carelia* (1923).

Sejalan dengan kata “sepakat” tersebutlah yang menjadi kendala jika kita berkaca pada gugatan atas Kejahatan Genosida yang dilakukan oleh Ukraina kepada Rusia di mana kita ketahui bahwa Rusia menolak adanya pernyataan yang dibawa Ukraina kepada Mahkamah Internasional tersebut dengan dalih bahwa tidak ada indikasi Kejahatan Genosida dan membantah bukti yang telah diserahkan kepada Mahkamah Internasional dari Ukraina. Rusia pun masih mempertahankan argumen pertamanya bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki Yurisdiksinya untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan sebab Operasi Militer yang dilakukan adalah bentuk pertahanan yang sedang dilakukan oleh Rusia.

Hal tersebut disebabkan oleh rasa terancamnya Rusia akibat Ukraina bergabung dengan NATO dan menjalin kerja sama dengan baik bersama dengan Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, putusan sementara Mahkamah Internasional yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, tetaplah harus ditindaklanjuti kembali menjadi nasihat hukum atau keputusan yurisdiksi tetap yang mana hingga saat ini pun, Sidang Yurisdiksi Mahkamah Internasional masih berlanjut dan didasarkan pula oleh dukungan dari berbagai macam negara yang mendesak Mahkamah Internasional untuk mengklaim Kejahatan Genosida oleh Rusia kepada Ukraina dengan beberapa bukti yang dirasa cukup.

4. Kesimpulan

International Court of Justice telah mengeluarkan *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia* (2022) yang mana sudah menjadi wewenang yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk memberikan langkah-langkah sementara. Pada permohonannya, Ukraina tidak menyebutkan secara langsung bahwa Rusia telah melakukan tindak Kejahatan Genosida, tetapi dengan isyarat bahwa Rusia mungkin saja merencanakan tindakan genosida di Ukraina. Beberapa argumen yang dilayangkan oleh Ukraina sebagai dasar dari permohonan, nyatanya tidak dapat mendorong Mahkamah Internasional untuk menyatakan secara resmi bahwa Rusia telah melakukan tindak genosida ke Ukraina dengan dalih awal Operasi Militer.

³² Ahmad Syofyan, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2022), hlm. 49.

Berdasarkan pada kasus Ukraina dengan Rusia, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini masuk ke dalam cakupan Yurisdiksi Mahkamah Agung yang mana memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara negara-negara. Namun, jika berkaca pada gugatan atas Kejahatan Genosida yang dilakukan oleh Ukraina kepada Rusia di mana Rusia menolak adanya pernyataan tersebut dengan dalih bahwa tidak ada indikasi Kejahatan Genosida dan hanya merupakan Operasi Militer sebagai bentuk pertahanan nasional atas ancaman yang diterimanya, maka saran yang diberikan oleh Penulis adalah menindaklanjuti keputusan sementara menjadi keputusan tetap agar segala hal yang mencakup di dalam keputusan tersebut dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak negara yang berkonflik.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, H. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum Internasional Sumber – Sumber Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Risnain, M., Nurbani, E. S., Pitaloka, D., & Apriliana, A. N. R. (2023). *Pengantar Hukum Internasional Pendekatan Kemahiran Hukum, Etika Hukum, Hukum dan Gender, serta Hukum dalam Konteks Lokal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sabon, M. B. (2019). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Suwardi, S. S., & Kurnia, I. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Natamiharja, R., Putri, R. W., Sabatira, F., Saputra, M. F., & Situmorang, Y. P. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi 2*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Syofyan, A. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Jurnal

- Irni, S. M., & Prasetya, D. (2023). Kekuatan Hukum *International Criminal Court* Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin. *Unes Law Review*, 5(4), 2741-2752. doi:10.31933/unesrev.v5i4.494, p. 2748.
- Isra, M. N. (2021). Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism Dan Scandinavian Realism. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 1487-1501. doi:10.58258/jisip.v5i4.2587, p. 1490.
- Nadira, T., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2021). Analisis Yuridis Serangan Amerika Serikat dengan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata terhadap Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran di Baghdad Irak Menurut Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 519-544. doi:10.14710/dlj.2021.30603, p. 538.

- Nurkhasan, W. A., Harini, S., & Hatmini, S. S. (2022). *Luhanks and Donets Separatists in Ukraine in 2022*. *Jurnal Solidaritas Fisip Unisri*, 6(2), 1-20, p. 2.
- Puspita, N. Y. (2022). *Invasi Rusia Ke Ukraina Jilid II: Agresi Atau Self-Defence?*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 600-608. doi:10.17977/um019v7i3p600-608, p. 605.
- Satria, A. W. (2022). Prinsip Kedaulatan Wilayah Negara Terhadap Masuknya Pesawat Tempur Asing Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 10(1), 140-150, p. 146.
- Syahbuddin, S., & Haryati, T. (2022). Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia. *Jurnal Pendidikan IPS, STKIP Taman Siswa Bima*, 12(1), 39-48. doi:10.37630/jpi.v12i1.617, p. 39
- Winarwati, I. (2014). *Eksistensi Mahkamah Internasional sebagai Lembaga Kehakiman Persekutuan Bangsa – Bangsa*. *Jurnal Rechstidee*, 9(1), 56 – 71. doi:10.21107/ri.v9i1.415, p. 63.

Website

- Amri Amrullah. (2023). Komisi Anak – Anak Rusia Tolak Tuduhan Soal Penculikan Anak – Anak Ukraina. Retrieved from [Komisi Anak Rusia Tolak Tuduhan ICC Soal Penculikan Anak-Anak Ukraina | Republika Online](#), diakses 7 Oktober 2023.
- Christian Gamas. Seri Hukum Internasional #14 : Yuridiksi International Court of Justice (ICJ) / Mahkamah Internasional (Terakhir). Retrieved from <https://christiangamas.net/seri-hukum-internasional-14-yuridiksi-international-court-of-justice-icj-mahkamah-internasional/>, diakses 26 Oktober 2023.
- Danur Lambang Pristiandaru. (2022). Serangan Siber Besar – Besaran di Ukraina, Banyak Situs Web Pemerintah Diretas. Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2022/01/14/183100970/serangan-siber-besar-besaran-di-ukraina-banyak-situs-web-pemerintah>, diakses 4 Oktober 2023.
- European Parliament. (2023). International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine v Russia. Retrieved from [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729350/EPRS_ATA\(2022\)729350_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729350/EPRS_ATA(2022)729350_EN.pdf), diakses 4 Oktober 2023.
- Khairisa Ferida. (2023). Zelensky Sebut Rusia Lakukan Genosida di Ukraina, Desak Pemimpin Dunia Hadiri KTT Perdamaian. Retrieved from [Zelensky Sebut Rusia Lakukan Genosida di Ukraina, Desak Pemimpin Dunia Hadiri KTT Perdamaian - Global Liputan6.com](#), diakses 7 Oktober 2023.
- Mahdi Muhammad. (2022). Kelompok Separatis Minta Bantuan Rusia, Putin Serukan Operasi Khusus. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/02/24/kelompok-separatis->

[meminta-bantuan-rusia-putin-serukan-operasi-khusus?status=sukses_login&status_login=login](#), diakses 4 Oktober 2023.

Naomy A. Nugraheni. (2021). Cerita Penegakan Demokrasi di Ukraina Via Revolusi Oranye Hari ini 17 Tahun Lalu. Retrieved from [Cerita Penegakan Demokrasi di Ukraina Via Revolusi Oranye Hari Ini 17 Tahun Lalu - Dunia Tempo.co](#), diakses 4 Oktober 2023.

Rahma Indina Harbani. (2022). Kronologi Konflik Rusia-Ukraina Sejak 1991, Berawal dari Pecahnya Soviet. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5966988/kronologi-konflik-rusia-ukraina-sejak-1991-berawal-dari-pecahnya-soviet>, diakses 4 Oktober 2023.

Sefti Oktarianisa. (2022). Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina/amp>, diakses 4 Oktober 2023.

Teti Purwati. (2022). Simak! Sejarah Panjang Gejolak Politik Ukraina, Sejak 1991. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220201113658-17-312028/simak-sejarah-panjang-gejolak-politik-ukraina-sejak-1991>, diakses 4 Oktober 2023.

Umaya Khusniah. (2022). Rusia Serang Ukraina, Ini Sebenarnya Tujuan Presiden Vladimir Putin. Retrieved from <https://www.inews.id/news/internasional/rusia-serang-ukraina-ini-sebenarnya-tujuan-presiden-vladimir-putin/all>, diakses 4 Oktober 2023.